

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memasuki era otonomi daerah dengan diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 (kemudian menjadi UU No.32 tahun 2004) dan UU No.25 tahun 1999 (kemudian menjadi UU No 33 tahun 2004) tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan masyarakat lokal. Tercapainya keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berdasarkan prinsip desentralisasi, sentralisasi, dan pemerintahan bersama. Salah satu fenomena gerakan pemerintahan daerah sendiri adalah desentralisasi, dimana daerah diberikan tugas, tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan dan mengurus pekerjaan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sekaligus memimpin hukum.²

Sesuai dengan undang-undang tentang kewenangan daerah tahun 2000 32, asas desentralisasi, asas sentralisasi dan pelaksanaan kewenangan daerah secara gotong royong. Asas desentralisasi dalam undang-undang ini mengikuti pengertian: (1) Pemberdayaan berbagai

² Muis Dan Hilwa Noni, "Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara", Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara

pemerintahan kepada negara-negara otonom, kecuali kekuasaan di bidang pertahanan dan keamanan, politik luar negeri, peradilan dan mata uang/keuangan dan agama. dan organisasi sektor publik lainnya. (2) Proses pembentukan kabupaten baru menurut asas desentralisasi 1 atau pengakuan adanya kabupaten yang dibentuk berdasarkan undang-undang sebelumnya. Salah satu dampak otonomi daerah dan desentralisasi adalah perlunya reformasi pengelolaan keuangan daerah. Bidang pengelolaan keuangan di daerah yang perlu direformasi antara lain pengelolaan pendapatan daerah dan pengelolaan belanja daerah. Pelaksanaan otonomi daerah secara umum saat ini bertujuan untuk mengembangkan semua potensi ekonomi yang ada. Sehingga dapat mendorong peningkatan kegiatan ekonomi daerah dan meningkatkan perekonomian nasional. Penyelenggaraan pemerintahan otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mensyaratkan adanya keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.³

Penggunaan potensi ekonomi di daerah. Penyerahan kekuasaan yang luas dan nyata dari pusat ke daerah otonomi melahirkan pusat-pusat baru di daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Kekuasaan dan wewenang pemerintahan yang diserahkan ke daerah, salah satunya untuk mengelola APBD yang mencakup: mengelola dana transfer, mengelola fiskal daerah

³ Wahidahwati, Heryanti, D. C.& Suryono, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Diprovinsi Jawa Timur", Jurnal Analisa No. 3 Hal 98-116

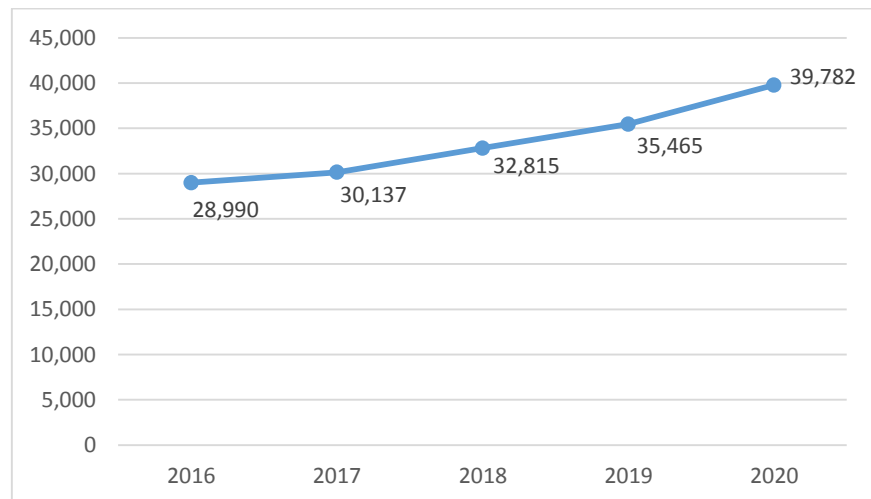
melalui pungutan pajak daerah dan retribusi, mengelola lain-lain penerimaan yang sah dalam sumber PAD. Kinerja keuangan merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan apabila kinerja dilakukan sesuai dengan apa yang direncanakan maka kinerja tersebut terlaksana dengan baik tetapi apabila kinerja yang dilaksanakan melebihi apa yang dilaksanakan maka kinerja tersebut terlaksana dengan sangat baik.⁴

Dengan demikian dalam pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap dan akuntabilitas pendapatan daerah yang tinggi berujung pengukuran pada pemerintahan Provinsi Jawa Timur . yang mana tujuan dari pengukuran tersebut untuk meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan akutabilitas Provinsi Jawa Timur sehingga pemerintahan Provinsi Jawa Timur dituntut mampu membangun pendapatan daerah yang baik.⁵

⁴ Sari,I. P,“Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, LEVERAGE, Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah” No.3

⁵ Budianto & W Alexander, “Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara “ *Jurnal EMBA*, No. 4 Hal 844-851

Grafik 1.1
Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020



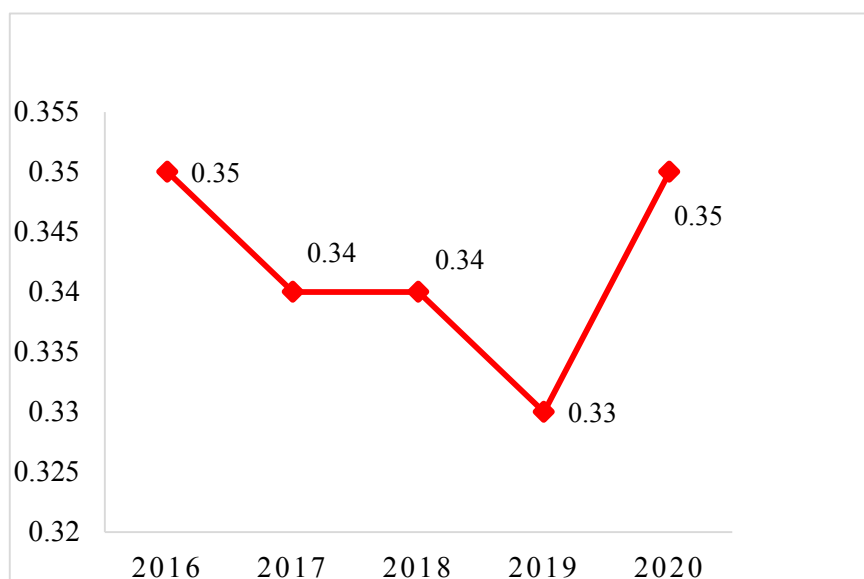
Sumber : Badan Pusat Statistika Indonesia, 2021⁶

Pada grafik 1.1 merupakan data pendapatan daerah provinsi Jawa Timur pendapatan daerah yang tertinggi pada tahun 2020 sebesar senilai 39.782. Semakin tahun pendapatan daerah mengalami peningkatan maka akan menghasilkan keuntungan yang besar. dan sebaliknya pendapatan daerah yang paling rendah pada tahun 2017 senilai 30.137 sehingga dapat dikatakan bahwa pendapatan daerah setiap tahun ke tahun pada provinsi Jawa timur mengalami kenaikan. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor utama antara lain: belanja modal, ukuran pemerintah daerah, dana perimbangan, dan Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, kinerja keuangan pemerintah

⁶ Badan Pusat Statistik, Laporan Keuangan, <https://www.bps.go.id/>, diakses pada Rabu 23 Juni 2021, pukul 19.30 WIB

daerah yang menjadi poin penting maka analisis terdapat faktor-faktor yang memenuhi kinerja keuangan pemerintah daerah penting untuk dilakukan. Beberapa penelitian yang telah dilakukan secara umum hasilnya menyatakan bahwa informasi yang ada dalam laporan keuangan pemerintah daerah dan dinyatakan dalam rasio keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.⁷

Grafik 1.2
Rata-rata Nilai Kinerja Keuangan
Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021⁸

⁷ Mustiaranisa, Estetika, “ *Analisis Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, Belanja Daerah, PBDB dan IPM terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Pada Daerah Otomom Baru di Indonesia*” Universitas Sebelas Maret, Tahun 2015

⁸ Badan Pusat Statistik, Laporan Keuangan, <https://www.bps.go.id/>. diakses pada Rabu 23 Juni 2021, pukul 19.30 WIB

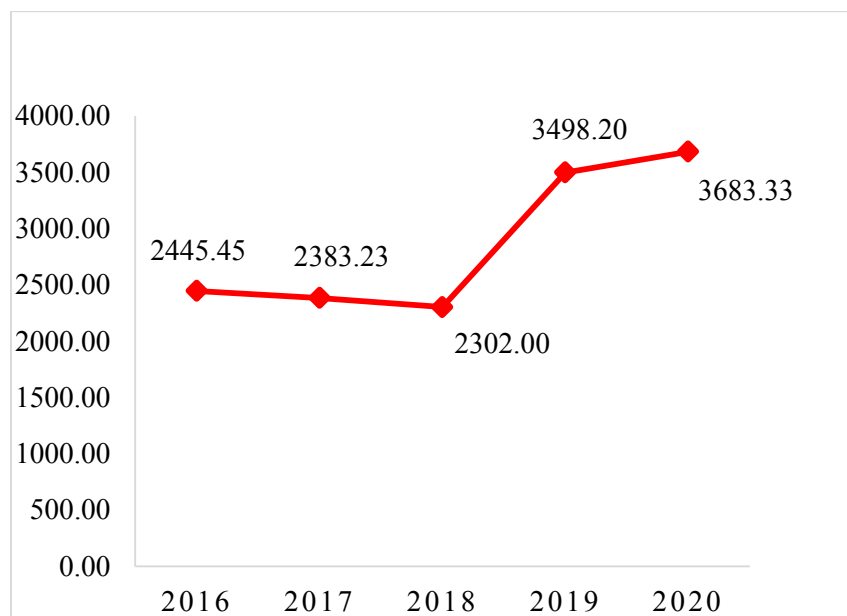
Pada Grafik 1.2 diketahui bahwa rata-rata nilai kinerja keuangan kab/kota di Jawa Timur tertinggi pada tahun 2016 dan tahun 2020 yaitu sebesar 0,35%, sedangkan terendah pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,33% sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan setiap tahun pada provinsi Jawa timur mengalami kenaikan dan penurunan. Kinerja keuangan adalah Salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk memastikan kemampuan daerah dalam melaksanakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar untuk mempertahankan layanan yang diinginkan. Penilaian kinerja keuangan tidak sama dalam setiap tahunnya, hal tersebut dikarenakan kinerja keuangan dipengaruhi oleh hal yang berbeda. Semakin tinggi nilai kinerja keuangan maka akan semakin baik kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan yang dimiliki.⁹

Penelitian Hasna Lathifa dan Haryanto menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, dikatakan bahwa pendapatan asli daerah dapat memberikan kontribusi pertumbuhan pendapatan daerah. Jika pendapatan daerah mengalami peningkatan maka terjadi peningkatan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan daerahnya sehingga memberikan indikasi

⁹ Fajar & Nugroho “ *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Provinsi Jawa Tengah)*” Jurnal, Universitas Diponegoro

bahwa pemerintah daerah telah memiliki kinerja yang baik.¹⁰ Hal tersebut serupa dengan penelitian Julitawati yang menyatakan bahwa peningkatan PAD akan mempengaruhi peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat menekan pajak daerah, retribusi daerah, dan penerimaan lain agar PAD meningkat setiap tahunnya.¹¹

Grafik 1.3
Rata-rata Nilai Belanja Modal (Juta Rupiah) Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021¹²

¹⁰ Hasna Lathifa, Haryanto, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*, Journal Of Accounting, Vol.8 No. 2 Tahun 2019.

¹¹ Julitawati, Ebit, Darwanis, Dan Jalaluddin, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah*, Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol . 1 No. 1 Tahun 2012

¹² Badan Pusat Statistik, Laporan Keuangan, <https://www.bps.go.id/>. diakses pada Rabu 23 Juni 2021, pukul 19.30 WIB

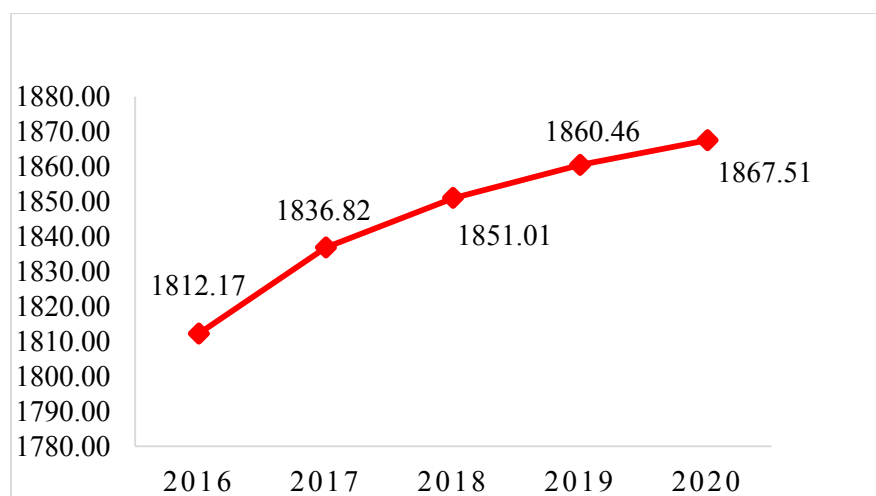
Grafik 1.3 menunjukkan bahwa rata-rata belanja modal kab/kota di Jawa Timur tertinggi pada tahun 2020 yaitu bernilai 3683,33. Semakin tahun belanja modal mengalami peningkatan maka akan menghasilkan keuntungan yang besar. Sedangkan nilai belanja modal yang terendah pada Tahun 2018 yaitu sebesar 2302,00 sehingga dapat dikatakan bahwa belanja modal setiap tahun ke tahun pada provinsi Jawa timur mengalami kenaikan. Belanja modal merupakan pengeluaran yang bisa disebut dengan expenditure yang terdiri dari belanja rutin atau belanja operasional pemerintahan daerah dalam suatu periode tertentu. Belanja tersebut dipergunakan untuk membebankan pelayanan publik sebaik-baiknya. Semakin baik pelayanan publik yang diberikan, menunjukkan semakin baik pengelola pembelanjaan pemerintah daerah, pengelola pembelanjaan yang baik menciptakan value for money yang baik, sehingga penilaian akan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah menjadi baik pula.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Indah Permata Sari dan I Ketut Mustanda menyatakan bahwa apabila pendapatan suatu daerah semakin tinggi maka belanja untuk memenuhi kebutuhan roda pemerintah semakin tinggi pula. Belanja memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, Belanja Daerah sangat berkaitan

¹³ Alvini & Yevi, “*Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Daerah Kepada Pemerintah Pusat dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten/kota SeProvinsi Riau Periode 2011-2016)*” Hal 1-15

erat dengan kualitas pelayanan publik yang akan diberikan daerah kepada masyarakat dan Belanja Daerah dapat dibedakan menjadi 2 yaitu Belanja Modal dan Belanja Administrasi belanja yang telah dilakukan oleh pemerintah berfungsi sebagai kebijakan ekonomi yang nantinya dampaknya pada perekonomian daerah. Pendapat ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan Aydin et al dan Ayinde et al yang memperoleh hasil bahwa jika belanja pemerintah dialokasikan secara tepat akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.¹⁴

Grafik 1.4
Rata-rata Nilai Ukuran Pemerintah Daerah (Juta Rupiah) Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021¹⁵

¹⁴ Ni Made Diah Permata Sari & I Ketut Mustanda, “ Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap kinerja Keuangan Pemerintah Daerah” No. 8 Vol. 8 Tahun 2019

¹⁵ Badan Pusat Statistik, Laporan Keuangan, <https://www.bps.go.id/>. diakses pada Rabu 23 Juni 2021, pukul 19.30 WIB

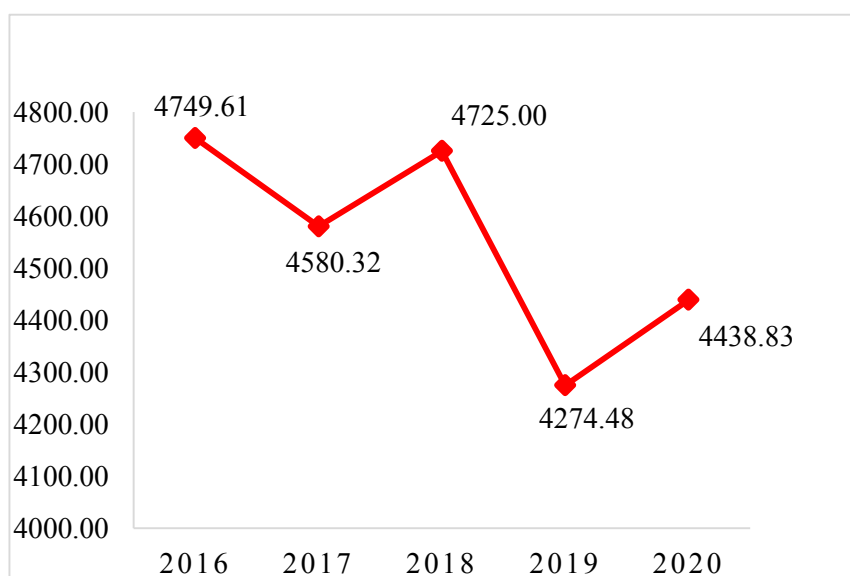
Grafik 1.4 menunjukkan bahwa rata-rata Nilai Ukuran Pemerintah Daerah kab/kota di Jawa Timur yang tertinggi jatuh pada Tahun 2020 yaitu 1867,51. Semakin tahun Ukuran Pemerintah Daerah mengalami peningkatan maka akan menghasilkan keuntungan yang besar. Sedangkan nilai Ukuran Pemerintah Daerah yang paling rendah pada tahun 2016 yaitu 1812,17 sehingga dapat dikatakan bahwa belanja modal setiap tahun ke tahun pada provinsi Jawa timur mengalami kenaikan. Ukuran pemerintah daerah adalah seberapa besar atau kecilnya pemerintah yang ditunjukkan dengan besarnya aset pemerintah daerah. Pemerintah daerah dengan ukuran yang besar akan menunjukkan operasional dan juga memberikan kelancaran dalam mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar ukuran pemerintah daerah lebih dituntut dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih optimal.¹⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Putri menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki tujuan utama dalam melaksanakan program kerja yaitu dengan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik, pemerintah daerah harus didukung dengan aset yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan

¹⁶ M.. Shabri A, Hasan Basri, Mulia, Andirfa,” Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh” Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, No. 5 Hal. 30-38

yang baik bagi masyarakat. Dengan demikian, semakin besar ukuran daerah yang ditandai dengan besarnya jumlah aset pemerintah daerah, maka Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.¹⁷

Grafik 1.5
Rata-rata Nilai Dana Perimbangan (Juta Rupiah)
Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021¹⁸

Grafik 1.5 menunjukkan bahwa rata-rata Dana Perimbangan kab/kota di Jawa Timur yang tertinggi jatuh pada Tahun 2016 sebesar 4749,61, sedangkan yang terendah pada tahun 2019 yang senilai 4274,48

¹⁷ Rizki Artya Rahma Putri, “ Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”, Jurnal e-ISSN: 2460-0585

¹⁸ Badan Pusat Statistik, Laporan Keuangan, <https://www.bps.go.id/>. diakses pada Rabu 23 Juni 2021, pukul 19.30 WIB

oleh karena itu setiap tahunnya dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan setiap tahun pada provinsi Jawa timur mengalami kenaikan dan penurunan. Dana Perimbangan adalah sumber pendapatan lain daerah yang memiliki kontribusi besar pada struktur APBD. Berdasarkan UU No 33 tahun 2004 menyebutkan bahwa dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan atau yang sering disebut dengan dana transfer ini mempunyai peran yang penting terutama untuk mencapai efisien dan keadilan dalam penyediaan layanan publik. Dana perimbangan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu dana yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah tergantung kepada pemerintah pusat untuk kebutuhan daerahnya. Sehingga akan membuat kinerja pemerintah daerah menurun.¹⁹

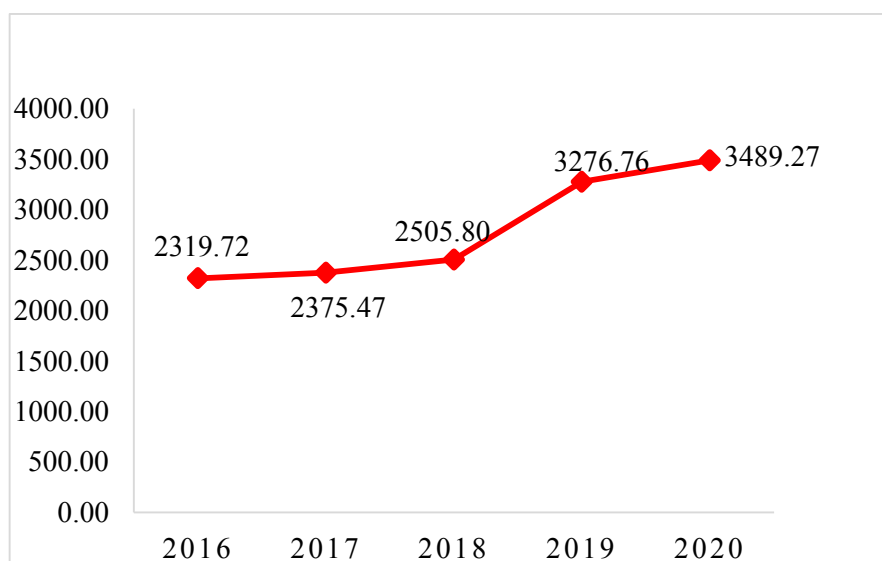
Penelitian yang dilakukan oleh Indah Puspa Sari dan Restu Agusti²⁰ menyatakan bahwa realisasi belanja daerah lebih tinggi daripada pendapatan daerah maka akan terjadinya defisit. Oleh karena itu untuk

¹⁹ Saraswati, D. & Y.S. Rioni “ *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*” Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik, No. 9 Hal. 110-120

²⁰ Indah Puspa Sari dan Restu Agusti “ *Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan Dan Ukuran Legeslatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota Pulau Sumatra)*”

menutupi kekurangan belanja daerah maka pemerintah pusat mentransfer dana dalam bentuk dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan akan masuk kedalam akun pendapatan daerah sehingga meningkatkan total penerimaan daerah sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah. Bahwa dana perimbangan terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Grafik 1.6
Rata-rata Nilai Pendapatan Asli Daerah (Juta Rupiah)
Kab/Kota di Jawa Timur Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021²¹

Grafik 1.6 menunjukkan bahwa rata-rata Pendapatan Asli Daerah kab/kota di Jawa Timur yang tertinggi jatuh pada Tahun 2020 sebesar

²¹ Badan Pusat Statistik, Laporan Keuangan, <https://www.bps.go.id/>. diakses pada Rabu 23 Juni 2021, pukul 19.30 WIB

senilai 3489,27. Semakin tahun belanja modal mengalami peningkatan maka akan mengalami keuntungan yang besar. Nilai yang terendah jatuh pada Tahun 2016 yang senilai 2319,72 maka dikatakan bahwa belanja modal setiap tahun ke tahun pada provinsi Jawa timur mengalami kenaikan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai salah satu sumber yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Hal ini disebabkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat digunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya.

22

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Mulyani dan Hardiyanto Wibowo menyatakan bahwa kemampuan suatu daerah dalam menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pengembangan daerah tersebut. Disamping itu semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan faktor pendukung dari kinerja ekonomi makro. Hal tersebut menunjukkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, semakin besar PAD maka akan semakin tinggi kinerja keuangan yang diukur dari rasio efisiensi.

²² Simanullang dan Gideon, "Pengaruh Belanja modal, intergovernmental Revenue, dan Pendapatan Asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah", *Jurnal of Accounting*

Rasio efisiensi yang semakin tinggi mengidentifikasi kinerja yang buruk.²³

Permasalahan tersebut, maka peneliti mengkaji sejauh mana variabel yang mempengaruhi kinerja keuangan yang meliputi Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020. Alasan Peneliti Memilih Empat Variabel tersebut karena Empat Variabel tersebut dianggap sebagai variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Selain Alasan diatas, Kabupaten/Kota di Jawa Timur memiliki 38 Kabupaten/ kota saja. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengambil judul **“Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu:

1. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode

²³ Sri Mulyani dan Hardiyanto Wibowo, *“pengaruh belanja modal, ukuran pemerintah daerah, intergovernmental revenue dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan kab/kota diprovinsi jawa tengah tahun 2012-2015”*, Jurnal Universitas Muhammadiyah Purwokerto

akuntansi, semakin banyak belanja modal yang dikeluarkan berkontribusi terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur Namun, fenomena di lapangan menunjukkan bahwa kinerja keuangan dipengaruhi oleh pemerintah daerah Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini perlu dilakukan.

2. Ukuran pemerintah daerah adalah suatu tolak ukur atau acuan untuk mengetahui seberapa besar cakupan suatu objek tertentu, semakin banyak ukuran pemerintah daerah yang dikeluarkan berkontribusi terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur namun, fenomena di lapangan menunjukkan bahwa kinerja keuangan dipengaruhi oleh rasio efisien Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini perlu dilakukan.
3. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah, semakin banyak dana perimbangan yang dikeluarkan berkontribusi terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur namun, fenomena di lapangan menunjukkan bahwa kinerja keuangan dipengaruhi oleh pemerintah pusat Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini perlu dilakukan.

4. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, semakin banyak pendapatan asli daerah yang dikeluarkan berkontribusi terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur namun, fenomena di lapangan menunjukkan bahwa kinerja keuangan dipengaruhi oleh pajak daerah Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini perlu dilakukan.
5. Kinerja keuangan adalah pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi, semakin banyak kinerja keuangan yang dikeluarkan berkontribusi terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur namun, fenomena di lapangan menunjukkan bahwa kinerja keuangan dipengaruhi oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini perlu dilakukan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan mengenai latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah belanja modal mempengaruhi kinerja keuangan kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020?

2. Apakah ukuran pemerintah daerah mempengaruhi kinerja keuangan kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020?
3. Apakah dana perimbangan mempengaruhi kinerja keuangan kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020?
4. Apakah pendapatan asli daerah mempengaruhi kinerja keuangan kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020?
5. Apakah kinerja keuangan mempengaruhi kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini diantaranya :

1. Untuk menguji apakah belanja modal secara persial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2021.
2. Untuk menguji apakah ukuran pemerintah daerah secara persial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2021.
3. Untuk menguji apakah dana perimbangan secara persial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2021.

4. Untuk menguji apakah pendapatan asli daerah secara persial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2021.
5. Untuk menguji apakah kinerja keuangan secara persial berpengaruh signifikan terhadap kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2021

E. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna secara teori dalam pengembangan teoritis maupun praktis yang berkaitan dalam memecahkan permasalahan secara aktual. Berikut ini manfaat dari penelitian :

a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan mampu memberikan wawasan bagi para pembaca, selain itu agar mampu dijadikan sebagai pedoman bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan dapat dijadikan tambahan informasi mengenai kinerja keuangan kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020.

b. Kegunaan praktis

1) Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja dan serta diharapkan dapat

bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah daerah masing-masing wilayah.

2) Bagi akademik

Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebuah bahan pertimbangan mengenai pengambilan kebijaksanaan yang lebih baik dimasa mendatang. Terutama untuk memberikan tambahan informasi, dan masukan serta menyampaikan saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi FEBI IAIN Tulungagung.

3) Bagi penelitian selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan untuk mendukung penelitiannya dalam hal belanja modal, ukuran pemerintah daerah, dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan.

F. Ruang Lingkup Dan Keterbatasan Lingkungan

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian merupakan suatu batasan untuk memudahkan dalam pelaksanaan penelitian, agar lebih efektif serta efisien dan penelitian sehingga peneliti dapat memisahkan aspek tertentu dengan objek yang diteliti. Sedangkan batasan masalah adalah upaya untuk menetapkan ruang lingkup penelitian. Batasan masalah bertujuan untuk mengidentifikasi faktor apa saja yang termasuk ruang

lingkup masalah serta apa saja yang tidak termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian. Berdasarkan identifikasi tersebut peneliti memberi batasan masalah yang diteliti agar lebih spesifik yaitu mengenai empat variabel terhadap kinerja keuangan.

Dalam penelitian ini yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian adalah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur pada Periode Tahun 2016-2020. Variabel bebas dalam penelitian adalah Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur.

2. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup penelitian diatas, maka penelitian ini menggunakan data yang sudah ada pada website Badan Pusat Statistik. Hal ini karena tidak memungkinkan peneliti melakukan penelitian secara langsung untuk mendapatkan data Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur, terdapat kendala pada waktu dan tempat dikarenakan lokasinya jauh dari peneliti serta membutuhkan waktu yang cukup lama.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a) Belanja Modal

Pengertian Belanja Modal Merupakan Pengeluaran Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat.²⁴

b) Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah adalah seberapa besar atau kecilnya pemerintah yang ditunjukkan dengan besarnya aset pemerintah daerah. Pemerintah daerah dengan ukuran yang besar akan menunjukkan operasional dan juga memebrikan kelancaran dalam mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar ukuran pemerintah daerah lebih dituntut dalam memebrikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih optimal. Pemerintah daerah dengan ukuran yang besar mempunyai tekanan dalam pengungkapan kinerja keuangannya.²⁵

c) Dana Perimbangan

²⁴ Mulyani,Wibowo “ *Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, intergovementalrevenue, Terhadap Kinerja Keuangan* “ temuan dan Opini Audit Bpk pada kinerja keuangan, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, No. 14 ISSN : 2302-8556

²⁵ Sesotyaningtyas “ *Pengaruh Leverage, Ukuran Legislatif, Intergovernmental Revenue Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Riau Tahun 2008-2012*” Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Maritim Raja Haji Tanjungpinang, Jounal Of Accounting, Vol. 1 No. 1-24

Pengertian Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan lain daerah yang memiliki kontribusi besar pada struktur APBD. Berdasarkan UU No 33 tahun 2004 menyebutkan bahwa dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan atau yang sering disebut dengan dana transfer ini mempunyai peran yang penting terutama untuk mencapai efisien dan keadilan dalam penyediaan layanan publik²⁶

d) Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah Merupakan Penerimaan yang diperoleh daerah dengan cara dipungut berdasarkan peraturan daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas pajak daerah, Retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah, dan lain-lain PAD yang sah.²⁷

2. Definisi Operasional

Definisi operasional dari penelitian “pengaruh belanja modal, ukuran pemerintah, dana perimbangan dan pendapatan asli

²⁶ Sularso, Havid Dan Yanuar E, Restianto “ *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah*”, Media Riset Akuntansi, No. 1 Hal. 109-124

²⁷ Rohman, Abdul, Afif Fatri Pratama Dan Ahmad Royhaan, “ *Pengaruh Belanja Modal Dan Tranfer Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota* ”, JEMASI, No. 11 Hal 157-170

daerah terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur ” dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh atau hubungan antara variabel belanja modal, ukuran pemerintah daerah, dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020.

H. Sistem Penulisan Skripsi

Sistematika yang digunakan dalam penulisan skripsi yang saya buat ada 6 (enam) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas latar belakang, identifikasi masalah, rumusan dari masalah penelitian tersebut, tujuan dari penelitian, kegunaannya, ruang lingkup serta keterbatasan penelitian, dan juga definisi operasional. Pada bab I menjelaskan tentang garis besar dan pembahasan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan kerangka teori yang digunakan untuk memperkuat pokok permasalahan yang akan diteliti dan dapat dijadikan sebagai alat analisis untuk membahas objek penelitian ini. Bab ini juga membahas suatu kajian penelitian terdahulu. Fungsinya untuk dijadikan

sebagai jawaban sementara dan juga digunakan untuk membandingkan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini mengkaji mengenai pendekatan dan juga jenis yang digunakan penelitian untuk menggali informasi dan juga solusi pemecahannya, yang terdiri dari: pendekatan dan juga jenis penelitian; populasi, sampling dan sampel penelitian; sumber data, variabel dan skala pengukuran; teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian; dan juga teknik yang digunakan dalam analisis suatu data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini digunakan untuk menganalisis dari bab III, sehingga diketahui hasil penelitian berupa adanya keterkaitan antara variabel bebas dan variabel terikat yang telah diujikan.

BAB V HASIL PEMBAHASAN

Pada bab ini memaparkan tentang hasil dari rumusan masalah dalam penelitian yaitu pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Diprovinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020 . Serta bertujuan untuk menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan kemudian membandingkannya dengan teori ataupun dengan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan juga saran terkait dengan hasil pembahasan dan juga hasil penelitian.

Bagian akhir laporan ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.